

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dan Menguatnya Literasi Numerasi di Sekolah Penggerak SMA Negeri Jakarta Utara

Sriyono¹, Safri Nurmantu^{2*}

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

² safri@stiami.ac.id

*Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Evaluation;
Independent Curriculum;
Pancasila Learner Profile;
Numeracy Literacy

This research is about the Evaluation of the Independent Curriculum Policy in Realizing the Profile of Pancasila Students and the strengthening of numeracy literacy in the driving school of North Jakarta State High School. The purpose of this study is to evaluate the independent curriculum policy in realizing the profile of Pancasila students and the strengthening of numeracy literacy. The research method used is descriptive qualitative. This research uses observation, interviews, and documentation as tools to collect data. The results of this study indicate the success of the Merdeka Curriculum in realizing the profile of Pancasila students and strengthening numeracy literacy in students effectively, efficiently, adaptively, equitably, responsively and according to the demands of needs. In intracurricular learning, the process takes place efficiently or saves time, energy and costs because the discussion of the material is in accordance with learning outcomes. The Strengthening Pancasila Profile Project is less efficient, because it takes up to 25% of the time allocated for the overall curriculum schedule

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2030-2040 bangsa Indonesia akan mencapai suatu kondisi yang disebut bonus demografi yaitu terdapat 64% dari jumlah penduduk merupakan usia produktif antara usia 15-64 tahun. Hal ini berarti terdapat mayoritas penduduk dalam usia kerja yang dapat menghasilkan barang dan jasa, telah menyelesaikan pendidikan formalnya, mencari dan membangun karir, membangun sebuah keluarga, serta aktif terlibat dalam pembangunan komunitas (Dikutip dari Jurnal Mc Kenzie, et all dalam Salet, et all, 2023:193). Dengan usia produktif yang cukup besar ini merupakan modal dasar pembangunan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 (setelah 100 tahun Indonesia Merdeka) dan siap menjadi Pelajar Pancasila.

Pada saat itu, Indonesia menargetkan dapat menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Momentum bersejarah itu masih menunggu sekitar seperempat abad lagi, tetapi untuk mewujudkannya dibutuhkan persiapan yang matang dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul, berkualitas, dan memiliki karakter positif dan berakhlak mulia. Generasi EMAS (Energik, Multitalenta, Aktif, Spiritual) akan mewujudkan tercapainya Indonesia Emas seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MENKOPMK) Muhadjir Effendy.

Pelajar Pancasila saat ini tengah menempuh proses pendidikan untuk menjadi generasi muda dengan kemampuan handal yaitu a) Energik, sebagai generasi muda yang lincah, cekatan, terampil, dan cerdas; b) Multitalenta, sebagai generasi muda yang memiliki potensi, bakat, minat, dan kemampuan yang beragam dalam berbagai aspek; c) Aktif, sebagai generasi muda yang rajin, beraktivitas tinggi, pekerja keras, kreatif dan inovatif untuk mewujudkan cita-citanya.; dan d) Spiritual, sebagai generasi muda yang lincah, cekatan, terampil, cerdas, memiliki potensi, bakat,



minat, kemampuan beragam, rajin, beraktivitas tinggi, pekerja keras, kreatif dan inovatif yang dibarengi dengan kemampuan spiritual yang baik, yang ditunjukkan dengan Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Berkepribadian yang Tangguh, dan Rajin Beribadah.

Fenomena kenakalan remaja dan segala risikonya tidak berbanding lurus dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk membentuk generasi muda yang berkarakter positif, berakhlak mulia, melaksanakan nilai-nilai Pancasila, dan ajaran agama. Hal ini membuktikan telah terjadi degradasi moral atau demoralisasi yaitu penurunan moralitas generasi muda pelajar pancasila, memudarnya jati diri bangsa sebagai bangsa yang rajin, ramah, berbudi pekerti luhur, santun, religius dan beretika berubah menjadi bangsa yang brutal, menakutkan, tidak beretika, dan jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Kepribadian dan pola perilaku, serta harapan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, berpotensi, terampil, lincah, berkarakter positif, dan berakhlak mulia menjadi generasi muda yang lemah mental, lemah kepribadian, lemah keilmuan, dan lemah kemampuan literasi numerasi serta memudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau keadaan secara rinci dan sistematis. Data yang dikumpulkan dalam pendekatan ini berupa kata-kata, gambar, atau simbol-simbol yang kemudian dianalisis untuk memahami fenomena yang sedang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka topik yang akan digali dalam penelitian ini mengenai Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka melalui enam kriteria evaluasi menggunakan teori William N Dunn yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kemampuan Beradaptasi, Ekuitas atau Berkeadilan, Responsif/Daya Tanggap, dan Kesesuaian. Penelitian ini juga akan menggali hambatan dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka, dan menganalisis solusi atau upaya dari adanya hambatan.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

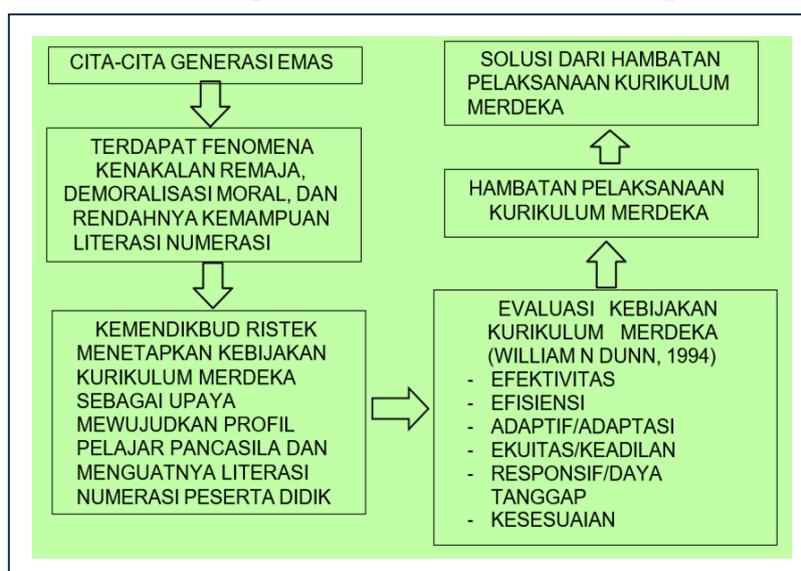
Perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (Kurtilas) adalah Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak ruang bagi sekolah dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal, berbeda dengan Kurikulum 2013 yang lebih terstruktur dan standar.

Kurikulum Merdeka memfasilitasi inklusivitas yang lebih baik dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individual siswa, sementara Kurikulum 2013 lebih fokus pada pencapaian standar nasional. Kurikulum Merdeka lebih mempertimbangkan aspirasi dan perkembangan pribadi peserta didik, sementara Kurikulum 2013 cenderung menekankan pada penguasaan materi akademik.

Hasil wawancara terhadap berbagai informan menunjukkan pandangan yang beragam dan komperhensif. Kepala Sekolah (Adriansyah) serta dua Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (Duryati dan Muhammad) menekankan bahwa KKTP memberikan panduan yang lebih jelas dan terukur dalam mengevaluasi pencapaian pembelajaran siswa, yang memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan berfokus pada penguasaan kompetensi inti. Fauzan mengapresiasi pendekatan KKTP yang fleksibel dan kontekstual, memberikan ruang bagi penyesuaian metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Hasil penelitian terhadap 7 informan menunjukkan pandangan yang beragam, akan tetapi umumnya berisikan pendapat yang positif. Dalam evaluasi kebijakan kurikulum merdeka, terbagi dalam dua bahasan besar yaitu profil pelajar pancasila dan literasi numerasi. salah satu hambatan utama adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai bagi guru dalam mengadopsi pendekatan baru ini. Banyak guru merasa belum sepenuhnya siap atau terlatih untuk mengimplementasikan kurikulum yang lebih adaptif dan

inklusif.

Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tata cara penilaian dan evaluasi yang berbeda dari pendekatan tradisional, yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem evaluasi nasional yang standar. Fauzan menyoroti bahwa sumber daya yang terbatas, baik dari segi dana maupun infrastruktur, menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Khoirunnisa dan Dewi juga menyoroti perlunya kerjasama yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, sekolah, dan komunitas, untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara konsisten dan efektif. Kepala Sekolah (Adriansyah) serta dua Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum (Duryati dan Muhammad) menyatakan bahwa PSP memberikan dorongan signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan fokus pada pengembangan kompetensi guru dan inovasi pembelajaran. Komite Pembelajaran (Fauzan) mengapresiasi struktur dan strategi PSP yang mendukung peningkatan kapasitas sekolah secara keseluruhan, serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.



Gambar 1. Bentuk dari penerapan pelajar Pancasila sebagai generasi emas

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

Chelimsky (1989) yang dikutip oleh Fuddin (2008) bahwa evaluasi sebagai suatu metode penelitian yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu program. Menurut Suchman (1961) dalam Arikunto (2010:1) evaluasi merupakan proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Worthen dan Sanders (1973) dalam Arikunto (2010:1) evaluasi merupakan kegiatan mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2010:2), untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Mohammad Ali (2014) mengatakan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap 10 kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan.

Menggunakan **Model taksonomi**, tujuan pembelajaran (taksonomi bloom dua dimensi). **Dimensi pertama** model taksonomi ini adalah dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif memuat enam kategori yaitu: ingatan (*remember*), pemahaman (*understand*), penerapan (*apply*), analisis (*analyze*), evaluasi (*evaluate*) dan kreativitas (*create*). Klasifikasi ini bersifat hierarkis dan kontinyu.

Dimensi kedua, Dimensi jenis pengetahuan memuat empat kategori, yaitu pengetahuan faktual (*factual knowledge*), pengetahuan konseptual (*conceptual knowledge*), pengetahuan prosedural

(*procedural knowledge*), dan pengetahuan metakognitif (*metacognitive knowledge*). Klasifikasi ini ditempatkan berdasarkan asumsi bahwa proses kognitif bermula dari konkret (*factual*) ke abstrak (metakognitif). Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud taksonomi Bloom duadimensi dalam penelitian ini adalah taksonomi Bloom hasilrevisi yang memandang tujuan pembelajaran dari dua dimensi, yaitu dimensi “proses kognitif” dan dimensi” jenis pengetahuan. Berkaitan dengan taksonomi bloom yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom yang disempurnakan oleh Anderson dapat dilihat pada gambar berikut:

Kebijakan Kurikulum Merdeka

Thomas R Dye dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy* (2002) Pemerintah melakukan banyak hal, mereka mengatur konflik di dalam masyarakat; mereka mengorganisir masyarakat untuk melanjutkan konflik dengan masyarakat lain; mereka mendistribusikan berbagai macam imbalan simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat; dan mereka menarik uang dari masyarakat, yang paling sering dalam bentuk pajak.

Willaim N. Dunn dalam Abdal (2015:43) kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan- keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Secara lebih lanjut, dijelaskan bahwa *public policy* (kebijakan publik) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan model evaluasi yang enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Introduction* (1994) yang diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dalam buku *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2018) yang diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press”.

Adapun enam kriteria evaluasi kebijakan yang mendasari peneliti melakukan penelitian terdiri dari:

- a. Efektivitas, yaitu mengukur sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan dapat dicapai. Evaluasi ini fokus pada hasil akhir yang diharapkan dari kebijakan tersebut dan apakah kebijakan tersebut berhasil masalah yang ditargetkan.
- b. Efisiensi, berkaitan dengan seberapa baik sumber daya (waktu, uang, tenaga kerja, dll) digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Evaluasi ini mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.
- c. Kemampuan beradaptasi, menilai seberapa baik kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi. Ini mencakup fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi perubahan lingkungan, kebutuhan, atau masalah yang mungkin muncul.
- d. Ekuitas atau keadilan, menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat atau terkena dampaknya. Evaluasi ini mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.
- e. Daya tanggap, mengukur seberapa cepat dan efektif kebijakan tersebut dalam merespons kebutuhan dan masalah yang ada. Ini mencakup kemampuan kebijakan untuk memberikan solusi yang tepat waktu dan relevan dengan situasi yang dihadapi.
- f. Kesesuaian, menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat yang menjadi target kebijakan

Penerapan Kurikulum Merdeka

Muliardi (2023) menerangkan bahwa Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kreativitas dan karakter bangsa. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan pendidikan di era globalisasi yang semakin kompleks dan beragam. Kurikulum merdeka mengajak siswa untuk aktif belajar dan berpikir kritis, serta mampu mengembangkan diri mereka secara mandiri. Pelaksanaan Kurikulum merdeka lebih dikenal dengan istilah “Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Dalam pengaplikasiannya, Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan ini melalui beberapa tahapan yang terdiri dari tahap siap, tahap perencanaan atau erancangan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang dijalankan berdasarkan Kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud.

1. Tahap Siap

- a. Melakukan perombakan terhadap Alur Tujuan Pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek . Melakukan perombakan terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek dalam tahap siap Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menyesuaikan alur tujuan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik di satuan pendidikan.
- b. Koordinator kurikulum di satuan pendidikan memimpin rapat koordinasi untuk membahas implementasi Kurikulum Merdeka Koordinator kurikulum di satuan pendidikan memimpin rapat koordinasi untuk membahas Implementasi Kurikulum Merdeka menjadi langkah kedua yang harus ditempuh dalam tahap siap. Dalam rapat koordinasi ini, satuan pendidikan dapat menetapkan target implementasi Kurikulum Merdeka dan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan, alur tujuan pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan asesmen, serta penggunaan dan pengembangan perangkat pembelajaran.

2. Tahap Perancangan

- a. Perancangan Kurikulum Satuan Operasional Pendidikan (KOSP)

KOSP adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. KOSP dikembangkan dengan prinsip dan proses penyusunan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Komponen yang diperlukan dalam menyusun KOSP antara lain karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional, serta lampiran yang terdiri dari SK Tim Pengembang Kurikulum, contoh rencana pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi landasan hukum berkaitan dengan karakteristik sekolah.

- b. Perancangan Alur Tujuan Pembelajaran

Dimulai dengan melakukan perombakan terhadap alur tujuan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Setelah itu, satuan pendidikan merancang alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Artinya, Alur Tujuan Pembelajaran yang disediakan masih bersifat general atau umum, sehingga perlu disesuaikan Kembali dengan karakteristik peserta didik.

Alur tujuan pembelajaran terdiri dari tujuan umum (menggambarkan tujuan pembelajaran secara umum), tujuan khusus (menggambarkan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik), dan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

- c. Perancangan Pembelajaran dan Asesmen

Pembelajaran dan asesmen dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dalam siklus yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen, di mana pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Tahap kedua adalah pelaksanaan pembelajaran dan asesmen formatif, dimana pendidik melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar peserta didik. Tahap terakhir adalah asesmen akhir, pendidik melaksanakan asesmen akhir untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, asesmen diagnostik juga penting dilakukan di awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan peserta didik dan mengetahui siapa saja yang sudah paham dan siapa saja yang perlu bantuan tambahan.

- d. Penggunaan dan pengembangan perangkat pembelajaran Penggunaan dan pengembangan perangkat pembelajaran dalam

Implementasi Kurikulum Merdeka sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Perangkat pembelajaran yang dapat digunakan antara lain buku teks, modul, media pembelajaran, dan lain sebagainya.

Selain itu, satuan pendidikan juga dapat mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, seperti pengembangan kreativitas, kemandirian, dan keberagaman. Dengan menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang baik, diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai.

3. Tahap Implementasi

- a. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Merdeka

Pembelajaran dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menganalisis Capaian Pembelajaran (CP) untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tahap kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Tahap ketiga adalah penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada tahap ini, pendidik harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Tahap terakhir adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan asesmen formatif dan asesmen akhir. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik harus berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat memberikan konsep pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik, dan menyiapkan pesertadidik memiliki keterampilan Abad 21.

- b. Pelaksanaan asesmen pembelajaran

Pelaksanaan asesmen pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan asesmen, pendidik menyusun rencana pelaksanaan asesmen formatif dan asesmen akhir. Tahap kedua adalah pelaksanaan asesmen formatif, pendidik melaksanakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar peserta didik. Tahap ketiga adalah penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pada tahap ini, pendidik harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Tahap terakhir adalah pelaksanaan asesmen akhir untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Laporan asesmen disajikan secara sederhana dan seinformatif mungkin agar peserta didik maupun orang tua murid bisa memahaminya. Selain penyajian laporan dalam bentuk yang mudah dimengerti, pendidik juga perlu memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tindak lanjutnya bersama-sama beserta orang tua

Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

1. Substansi Kurikulum Merdeka

- Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mewujudkan praktik pelajar Pancasila dan menguatnya literasi numerasi pada peserta didik.
- Substansi kurikulum Merdeka terdiri dari pembelajaran secara intrakurikuler dengan alokasi waktu 70 sampai dengan 80 persen di kokulikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan alokasi waktu 20 – 30 persen dari total alokasi waktu belajar selama satu tahun.
- Dalam kurikulum Merdeka proses pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran bermakna, berpusat pada peserta didik, berdiferensiasi atau sesuai kebutuhan peserta didik dan berlangsung komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik.
- Dalam kurikulum Merdeka terdapat asesmen awal / diagnostik, formatif atau penilaian pada

- proses pembelajaran, dan sumatif.
- e. Dalam kurikulum merdeka terdapat rapor hasil belajar intrakurikuler dan rapor proyek penguatan profil pelajar pancasila.
 - f. Proses Pembelajaran pada intrakurikuler dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan secara terpisah ruang dan waktunya.
 - g. Dalam kurikulum merdeka terdapat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran kelompok penjurusan dalam pembagian kelas.
 - h. Dalam kurikulum merdeka pengukuran keberhasilan sekolah dilakukan melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dengan hasil yang diumumkan pada rapor pendidikan.
 - i. Standar isi pada kurikulum merdeka diuraikan dalam bentuk capaian pembelajaran, isi, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran.
 - j. Pada sekolah menengah atas pelaksana kurikulum merdeka memasuki fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12.
 - k. Sekolah Penggerak (Pelaksana program sekolah penggerak) merupakan sekolah pelopor dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh kemendikbudristek berdasarkan hasil seleksi kepala sekolahnya.

2. Hasil Evaluasi Profil Pelajar Pancasila dan Literasi Numerasi

- a. Pelaksanaan kurikulum merdeka secara efektif dapat mewujudkan profil pelajar pancasila dan menguatkan literasi numerasi.
- b. Pelaksanaan kurikulum merdeka tidak efisien dalam waktu, tenaga dan biaya pada proyek penguatan profil pelajar pancasila, tetapi dapat efisien pada penguatan literasi numerasi karena model pembelajaran terintegrasi pembiasaan literasi numerasi pada peserta didik.
- c. Pelaksanaan kurikulum merdeka direspon positif oleh peserta didik dan masyarakat dengan cepat beradaptasi mengikuti berbagai mekanisme dalam kurikulum tersebut.
- d. Pelaksanaan kurikulum merdeka belum memenuhi unsur keadilan, karena cenderung berpihak kepada kelompok ekonomi kelas menengah keatas pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila. Akan tetapi, pelaksanaan kurikulum merdeka telah memenuhi unsur keadilan dalam pembelajaran intrakurikuler yang dibuktikan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan dan kondisi kemampuan peserta didik.
- e. Pelaksana P5 sangat menarik, dalam artian mendapat respon dari berbagai pihak, dan memenuhi standar daya tanggap.
- f. Pelaksanaan kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan generasi EMAS yang unggul, energi, multitalenta, aktif, dan spiritual.

3. Hambatan yang dialami pada pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka

- a. Kurangnya pelatihan dan sumber daya: Kurangnya pelatihan bagi guru dan sumber daya yang cukup dapat menghambat kemampuan guru untuk mengadopsi pendekatan baru dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa.
- b. Kendala kebijakan: Kendala kebijakan dapat menghambat fleksibilitas guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
- c. Resistensi kelembagaan: Resistensi kelembagaan dapat menghambat fleksibilitas guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
- d. Batasan kebijakan: Batasan kebijakan dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka, seperti kendali penggunaan teknologi dan prasarana yang tidak memadai.
- e. Kurangnya tata kelola: Kurangnya tata kelola dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka.
- f. Sarana dan prasarana yang tidak memadai: Sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat menghambat implementasi Kurikulum Merdeka.
- g. Miskonsepsi tentang pelaksanaan dan penilaian P5
- h. Rendahnya pemahaman guru dan peserta didik tentang dimensi profil pelajar pancasila
- i. Belum maksimalnya pemahaman terhadap Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran
- j. Belum maksimalnya pemahaman tentang sistem penilaian pada kurikulum merdeka
- k. Belum maksimalnya pemahaman tentang Pembelajaran Berdiferensiasi.
- l. Belum maksimalnya pemahaman tentang model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan

tuntutan kurikulum merdeka.

4. Berbagai solusi untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah:

- a. Pelatihan dan sumber daya: Dilakukan pelatihan bagi guru dan memperoleh sumber daya yang cukup untuk mengadopsi pendekatan baru dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa.
- b. Kebijakan: Dilakukan pengaturan yang fleksibel dalam kebijakan yang mengakses kemampuan guru untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
- c. Resistensi kelembagaan: Dilakukan pengumpulan dan pengolahan informasi yang dapat digunakan untuk mengubah resistensi kelembagaan.
- d. Batasan kebijakan: Dilakukan pengaturan yang mengakses kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dan prasarana.
- e. Tata kelola: Dilakukan pengaturan yang mengakses kemampuan guru dalam mengelola pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
- f. Sarana dan prasarana: Dilakukan pengaturan yang mengakses kemampuan guru dalam menggunakan sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Memahami sudut pandang orang lain: Dilakukan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain yang berbeda-beda, sehingga dapat memahami dan memilih yang sekiranya cocok dan bermanfaat.
- h. Tidak fokus pada permasalahan: Dilakukan pengumpulan dan pengolahan informasi yang dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan, serta tidak fokus pada permasalahan saja.
- i. Memahami akar permasalahan: Dilakukan pemahaman terhadap akar permasalahan, sehingga dapat menghindari hambatan yang serius.
- j. Memahami sudut pandang orang lain: Dilakukan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain yang berbeda-beda, sehingga dapat memahami dan memilih yang sekiranya cocok dan bermanfaat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Keberhasilan Kurikulum Merdeka dalam mewujudkan profil pelajar pancasila dan menguatnya literasi numerasi pada peserta didik secara efektif, efisien, adaptif, berkeadilan, responsif dan sesuai tuntutan kebutuhan. Pada pembelajaran Intrakurikuler, proses berlangsung secara efisien atau hemat dalam waktu, tenaga dan biaya karena pembahasan materi sesuai dengan capaian pembelajaran. Proyek Penguatan Profil Pancasila kurang efisien, karena memerlukan waktu hingga 25% dari alokasi waktu jadwal kurikulum secara keseluruhan

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat dilaksanakan untuk perbaikan pelaksanaan kurikulum merdeka dengan saran sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

- a. Seyogyanya Kemendikbud Ristek menyempurnakan atau melakukan revisi pada alokasi waktu untuk pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- b. Kemendikbud Ristek juga sebaiknya melakukan revisi Capaian Pembelajaran agar materi pokok dan kedalaman materi pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- c. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas memberikan panduan Pembelajaran Berdiferensiasi yang lebih jelas dan rinci

2. Saran Praktis

- a. Melakukan strategi pengaktifan kegiatan komunitas belajar internal sekolah, MGMP, dan antar sekolah.
- b. Mengaktifkan komunitas Belajar Musyawarah kerja Kepala Sekolah untuk mendapatkan substansi kurikulum merdeka
- c. Menetapkan kebijakan program pendidikan guru penggerak sebagai upaya meningkatkan pemahaman substansi kurikulum merdeka.

- d. Memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang substansi kurikulum merdeka.
- e. Meningkatkan peran komite pembelajaran, koordinator proyek penguatan profil pelajar pancasila, dan guru penggerak di setiap sekolah untuk mengembangkan substansi kurikulum merdeka.
- f. Alokasi waktu dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila digunakan secara efisien.
- g. Meminimalisir miskonsepsi bahwa proyek penguatan profil pelajar pancasila yang harus berupa produk dengan biaya mahal
- h. Mendorong peningkatan peran komite sekolah dalam mendukung program sekolah, khususnya pelaksanaan kurikulum merdeka.
- i. Kemendikbudristek melakukan revisi struktur kurikulum merdeka di alokasi waktunya.
- j. Kepala sekolah memelopori pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM).
- k. Guru meningkatkan pemahamannya terhadap capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang bermakna.
- l. Koordinator proyek penguatan profil pelajar pancasila mengisi modul proyek yang berkualitas sesuai dengan dimensi profil pelajar pancasila yang diharapkan.
- m. Kemendikbudristek meningkatkan *reward* kepala sekolah yang dapat meningkatkan hasil laporan pendidikannya.
- n. Seluruh stakeholder sekolah secara konsisten mencari berbagai terobosan dan menghasilkan berbagai solusi mengatasi hambatan pelaksanaan kurikulum merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., & Appulembang, Y. A. (2017). Pengaruh pola asuh terhadap kualitas hidup siswa pelaku tawuran. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 210-215.
- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 237-244.
- Anggraini, K. E., & Setianingsih, R. (2022). Analisis kemampuan numerasi siswa sma dalam menyelesaikan soal asesmen kompetensi minimum (AKM). *MATHEdunesa*, 11(3), 837-849.
- Arnett, J. (1992). Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective. *Developmental Review*, 12, 339-373.
- Aulia, W. (2024). Penyebab Kenakalan Remaja di Cipongkor. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 409-414.
- Aziz, Y. U. K. (2019). Pengaruh Efektifitas Perda No. 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan Terhadap Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Surabaya: Jurusan Filsafat Politik Islam fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Bachruddin, W., Kalalo, F., & Kundre, R. (2017). Pengaruh penyuluhan tentang bahaya seks bebas terhadap pengetahuan remaja tentang seks bebas di SMA Negeri Binsus 9 Manado. *Jurnal Keperawatan*, 5 (1).
- Bandura, A. (1973). *Aggression: A social learning analysis*. prentice-hall.
- Dalmeri, D. (2014). Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating For Character). *Al-Ulum*, 14(1), 269-288.
- Damayanti, E. (2023). Pencegahan Sikap Intoleransi Pada Siswa Melalui Penguatan Pendidikan Pacasila.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy. (No Title)*.
- Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis Evaluasi kebijakan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 686-692.

- Girsang, J. M. B., Al Zahro, N., & Nasution, R. K. (2024). Strategi Efektif dalam Meningkatkan Minat Baca pada Anak SD Kelas Rendah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25402-25406.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan ...*, 2(1), 76–84.
- Karlina, L. (2020). Fenomena terjadinya kenakalan remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147-158.
- Leonard, A., Gunawan, D., Widodo, E. R., & Purnawinarni, E. (2021). Tunas Pancasila. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. (2019). Penyalahgunaan konsumsi alkohol pada minuman keras bagi remaja terhadap kesehatan.
- McKenzie, J. F., Pinger, R. R., & Kotecki, J. E. (2006). Kesehatan Masyarakat, Suatu Pengantar Edisi 4. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Muliardi, M. (2023). Mengembangkan kreativitas dan karakter bangsa melalui Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 2(1), 1-12.
- Nisa, S., Zulkardi, Z., & Susanti, E. (2019). Kemampuan penalaran statistis siswa pada materi penyajian data histogram melalui pembelajaran PMRI. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 13(1), 21-40.
- Permata, J. T., & Nasution, F. Z. (2022). Perilaku Bullying Terhadap Teman Sebaya Pada Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 614-620.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1-13.
- Rahmat, D. (2014). Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Riani, D., Mayuni, I., & Sulistyanningrum, S. D. (2018). Cultural Literacy Praxis In Teaching And Learning English At Smpn 14 Padang (Case Study). *IJLECR (International Journal of Language Education and Cultural Review)*, 4(2), 137-142.
- Rohmah, S., Kusmayadi, T. A., & Fitriana, L. (2020). The effect of the treffinger learning model on mathematical connection ability students viewed from mathematical resilience. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 275-284.
- Rohman, A. F. (2023). Bimbingan Islam Melalui Positive Reinforcement Untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Smk Negeri 1 Kedungwuni (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Safitri, A., Wulandari, D., & Herlambang, Y. T. (2022). Proyek penguatan profil pelajar pancasila: Sebuah orientasi baru pendidikan dalam meningkatkan karakter siswa indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7076- 7086.
- Salet, D. L., Nursiani, N. P., Salean, D. Y., & Fanggidae, R. E. (2023). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas Oesapa Kupang. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(2), 185-201.
- Sari, F. B., Amini, R., & Mudjiran, M. (2020). Lembar kerja peserta didik berbasis model integrated di sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, 4(4)
- Satriawan, W., Santika, I. D., & Naim, A. (2021). Guru penggerak dan transformasi sekolah dalam kerangka inkuiri apresiatif. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11(1), 1-12.
- Sibagariang, D., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021). Peran guru penggerak dalam pendidikan merdeka belajar di indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88-99.

- Sufyadi, S., Lambas, L., Rosdiana, T., Rochim, F. A. N., Novrika, S., Iswoyo, S., ... & Mahardhika, R. L. (2021). Pembelajaran paradigma baru.
- Sumardiyono, S., Priatna, N., Anggraena, Y., & Khimawati, M. N. (2017). Modul pengembangan keprofesian berkelanjutan guru matematika smp terintegrasi penguatan pendidikan karakter: c kelompok kompetensi.
- Syafi'i, F. F. (2022, January). Merdeka belajar: sekolah penggerak. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar. Tahir, I., & Tahir, I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 74-83.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yamin, M., & Syahrir, S. (2020). Pembangunan pendidikan merdeka belajar (telaah metode pembelajaran). *Jurnal ilmiah mandala education*, 6(1).
- Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/news/352007/82-siswa-sma-di-jakarta-positif-narkoba> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 15.41 WIB
- Databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/20/ada-30-kasus-bullying-sepanjang-2023-mayoritas-terjadi-di-smp> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 15.12 WIB
- Detiknews.com <https://news.detik.com/berita/d-7438378/pemuda-bojonegoro-tewas-terpelanting-ke-selokan-saat-kabur-dikejar-geng-motor> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 16.19 WIB.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis. Sixth edition*. Dw.com. <https://www.dw.com/id/melihat-nasib-kaum-minoritas-dari-kasus-persekusi-di-tangsel/a-69022249> Diakses pada 20 Juli 2024 15.26 WIB
- Kompas Regional <https://regional.kompas.com/read/2023/02/01/215007178/diduga-melakukan-bullying-8-siswi-di-karanganyar-dilaporkan-polisi-oleh>.
Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 15.10 WIB. Kompas.com
<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/21/17320471/12-remaja-di-jagakarsa-ditangkap-saat-sedang-pesta-miras-dan-hendak> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 16.12 WIB Kompas.com
<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/18/22151171/pelajar-tewas-tertabrak-kereta-saat-tawuran-di-kedoya> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 16.34 WIB Kompas.com
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/02/193335671/hardiknas-2024-fsgi-ingatkan-masih-tingginya-kasus-kekerasan-di-sekolah> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 15.33 WIB
- Kumparan.com <https://kumparan.com/wiralumbangaol20041212/tren-seks-bebas-di-kalangan-remaja-1yySq0vy6Su/4> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 16.02 WIB
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi. (2021). Platform Kurikulum Merdeka. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Sindonews.com <https://metro.sindonews.com/read/1093779/170/12-juta-pengguna-narkoba-di-jakarta-forum-pemuda-betawi-gelar-deteksi-dini-ke-pelajar-1683702348> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 15.44 WIB
- Tirto.id <https://tirto.id/awas-ini-daftar-kasus-bullying-anak-di-sekolah-indonesia-2023-gMdf> Diakses pada 20 Juli 2024 pukul 15.11 WIB